

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM FASILITASI PEMBERDAYAAN PESANTREN (Studi Di Pemerintah Kota Bandar Lampung)

Oleh

MUHAMMAD FAZRY MAULANA

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia memiliki peran strategis dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, di berbagai daerah termasuk Kota Bandar Lampung, pesantren masih menghadapi keterbatasan pendanaan, sarana-prasarana, dan kapasitas kelembagaan. Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah menegaskan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan dukungan melalui rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik kebijakan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam memberikan fasilitasi pemberdayaan pesantren sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan dukungan dan fasilitasi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris guna menilaikesesuaian antara norma hukum dan implementasinya. Analisis normatif mengacu pada teori *Stufenbau* dan keuangan daerah dalam penyediaan fasilitasi pesantren. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pejabat pemerintah daerah, kementerian agama, dan pengelola pesantren sebagai penerima maupun non penerima bantuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah belum berjalan optimal akibat ketiadaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan pemberdayaan pesantren sebagai dasar yuridis dan fiskal. Kebijakan yang ada masih bersifat administratif tanpa dukungan regulasi komprehensif, sehingga fasilitasi belum mampu menjawab kebutuhan struktural pesantren. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Peraturan Daerah, penguatan alokasi anggaran, dan dukungan terhadap kemandirian ekonomi pesantren sebagai wujud implementasi prinsip negara hukum desentralistik dalam kerangka pemberdayaan pesantren di Kota Bandar Lampung.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Fasilitasi, Pemberdayaan Pesantren.

ABSTRACT

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN FACILITATING PESANTREN EMPOWERMENT (A Study in the Government of Bandar Lampung City)

By

MUHAMMAD FAZRY MAULANA

As the oldest Islamic educational institutions in Indonesia, Islamic boarding schools (pesantren) play a strategic role in education, da'wah (Islamic outreach), and community empowerment. However, in various regions, including Bandar Lampung City, Islamic boarding schools still face limitations in funding, infrastructure, and institutional capacity. This is despite Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools affirming the obligation of the central and regional governments to provide support through recognition, affirmation, and facilitation. This situation indicates a gap between legal norms and policy practices at the regional level. This study aims to analyze the role of the Bandar Lampung City government in facilitating the empowerment of Islamic boarding schools as mandated by Law Number 18 of 2019, and to identify factors that hinder the implementation of such support and facilitation.

The research method used is a normative juridical approach combined with an empirical juridical approach to assess the suitability between legal norms and their implementation. The normative analysis refers to the Stufenbau theory and regional finance in providing Islamic boarding school facilities. The research data was obtained through literature studies and interviews with local government officials, the Ministry of Religious Affairs, and Islamic boarding school managers, both recipients and non-recipients of assistance.

The research results indicate that the role of local governments has not been optimal due to the absence of regional regulations on the implementation and empowerment of Islamic boarding schools as a legal and fiscal basis. Existing policies are still administrative in nature without comprehensive regulatory support, so facilitation has not been able to meet the structural needs of Islamic boarding schools. Therefore, it is necessary to formulate Regional Regulations, strengthen budget allocations, and support the economic independence of Islamic boarding schools as a manifestation of the implementation of the principles of a decentralized legal state within the framework of Islamic boarding school empowerment in Bandar Lampung City.

Keywords: *Local Government, Facilitation, Empowerment of Islamic Boarding Schools.*